KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
Jalan Otto Iskandardinata No. 53-55 Jakarta Kode Pos 13330
Telepon : (021) 8190410 Faksimile : (021) 8195583
Website www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta/id

Nomor : S-2665 /WPB.12/2018 — 14 Agustus 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018

Yth. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat

Sehubungan tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pembinaan pelaksanaan anggaran daerah serta sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2018 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,

Hajoe Saptaria
NIP 197007231996032001

Tembusan :
1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
2. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal
3. Gubernur DKI Jakarta c.q. Kepala Biro Perekonomian

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan II
2018

Penyusun:
Penanggung Jawab: Rina Robiati I Ketua Tim: Dewi Yanti I Editor: Lia Amalia I Desain Grafis: Wulandari I Anggota: Saifudin Ali I Yusron I

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi DKI Jakarta

APBN 2018 Triwulan II

Pendapatan

Pagu ▶ 1.064,01 triliun

Realisasi ▶ 495,94 triliun (46,6%)

Belanja

Pagu ▶ 1.018,71 triliun

Realisasi ▶ 327,16 triliun (32,1%)

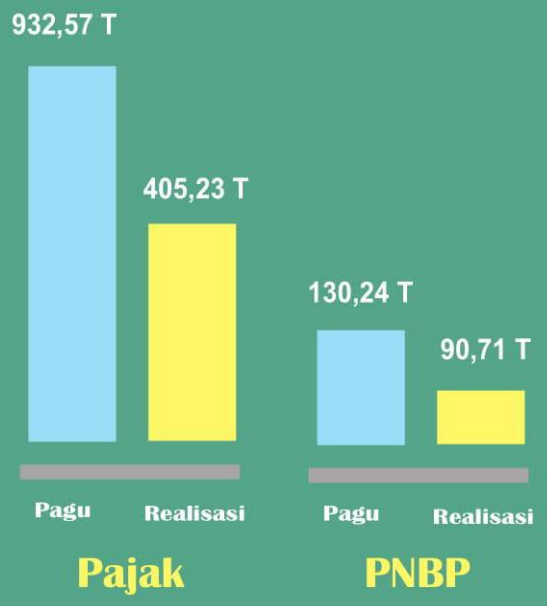

APBD 2018 Triwulan II

Pendapatan

Pagu ▶ 66,03 triliun

Realisasi ▶ 24.17 triliun (36,6%)

Belanja

Pagu ▶ 71,17 triliun

Realisasi ▶ 20,22 triliun (3%)

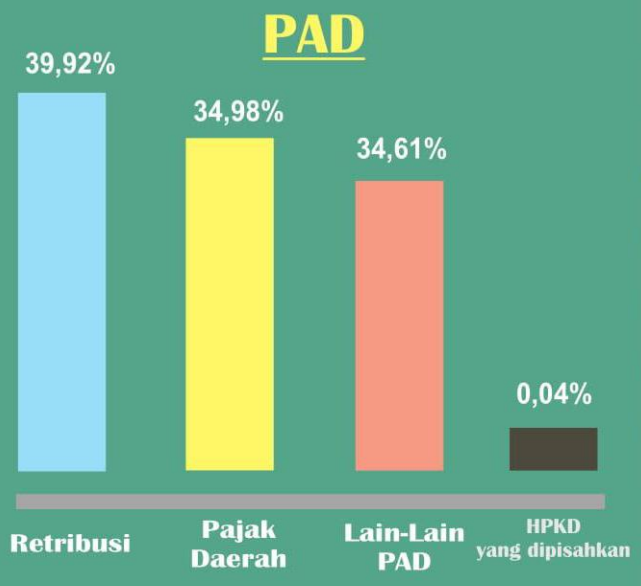

Sumber: Laporan GFS TW II 2018, OMSPAN, Dashboard BPKD 2017-2018

INFLASI

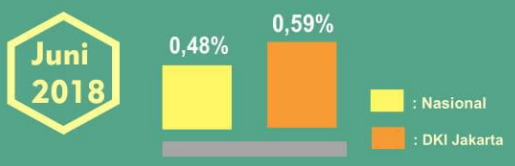

DKI Jakarta peringkat 55 dari 82 kota besar di Indonesia

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

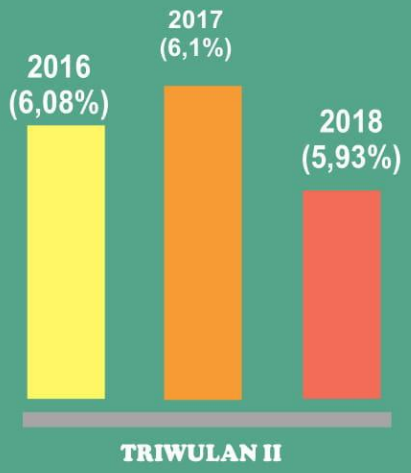

Pada triwulan II 2018 DKI Jakarta penyumbang terbesar dari PDRB Nasional 17,57 persen

TINGKAT KEMISKINAN DKI JAKARTA

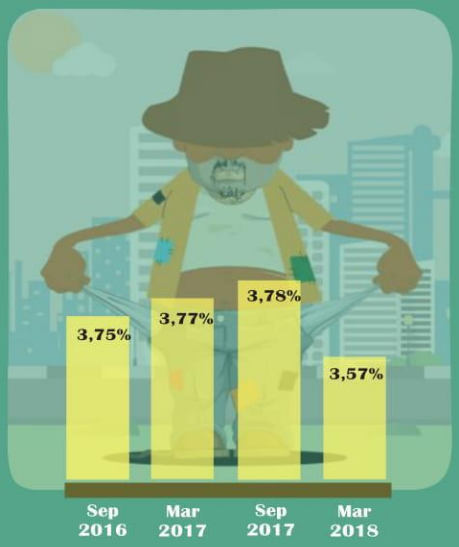

Persentase penduduk miskin terendah terjadi pada Maret 2018

Indeks Pembangunan Manusia

"DKI Jakarta sebagai peringkat IPM tertinggi di Indonesia Tahun 2017"

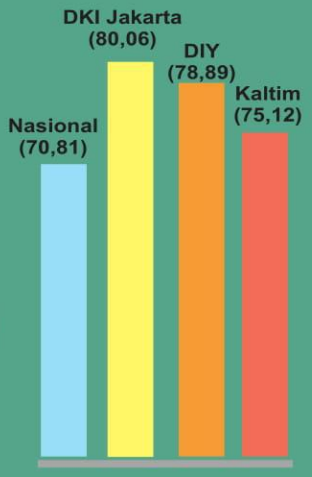

RASIO GINI

Sumber: BPS DKI Jakarta 2015 - 2018, Laporan GFS TW II 2018, OMSPAN, Dashboard BPKD 2017-2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL..... **1**
A. Produk Domestik Regional Bruto..... 1
B. Inflasi..... 2
C. Indikator Kesejahteraan..... 2

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN..... **4**
A. Pendapatan Negara..... 5
B. Belanja Negara..... 8
C. Prognosis Realisasi APBN..... 10

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD..... **11**
A. Pendapatan Daerah..... 12
B. Belanja Daerah..... 15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018..... 18

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)..... **19**
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian..... 19
B. Pendapatan Konsolidasian..... 19
C. Belanja Konsolidasian..... 22
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto..... 24

V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH..... **25**
A. Dampak Ekonomi Pelaksanaan Asian Games 2018 Capai Rp 45 Triliun 25
B. Kemiskinan DKI Terendah Sejak Empat Tahun Terakhir..... 25

DAFTAR PUSTAKA..... **ii**

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pada triwulan II 2018, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar dari PDRB Nasional yaitu sebesar 17,57 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta triwulan II 2018 diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai 654,28 triliun rupiah, sementara menurut harga konstan mencapai 429,34 triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2018 dipengaruhi oleh momentum bulan puasa dan Lebaran, serta sejumlah event penting seperti Asian Games, Pilkada serentak, persiapan Pilpres 2019 dimana dari sisi pengeluaran mempengaruhi peningkatan konsumsi rumah tangga, LNPRT dan ekspor baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain.

Tabel I.1
Asumsi Makro menurut Kebijakan Umum APBD Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2018

Indikator	Proyeksi DKI 2018	Proyeksi Nasional 2018
Pertumbuhan Ekonomi	6,12 – 6,52 %	5,4 – 6,1 %

Sumber : RKPD Pemerintah Provinsi DKI

Analisis Perbandingan:

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Tahun 2018 terhadap Triwulan I Tahun 2017 (y-o-y).

Ekonomi Jakarta pada triwulan II-2018 tumbuh 5,93 persen, lebih lambat bila dibandingkan dengan triwulan II-2017 sebesar 6,10 persen (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 43,81 persen diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 21,90 persen. Struktur perekonomian Jakarta masih didominasi Perdagangan Besar dan Eceran yang menyumbang sebesar 1.08 basis poin. Sedangkan dilihat dari sisi pengeluaran komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor sebesar 8,43 persen, namun tergerus oleh komponen impor yang juga meningkat sebesar 4.99 persen sehingga pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan triwulan II 2017.

Grafik I.1
Pertumbuhan PDRB Triwulan (y on y) 2016-2018 (%)

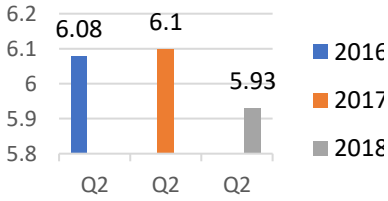

Sumber: Website BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2018

2. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2018 terhadap Triwulan I Tahun 2018 (q to q).

Ekonomi Jakarta triwulan II-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,47 persen (q-to-q). Perekonomian berjalan lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya terakselerasi oleh faktor lebaran dan libur panjang. Lapangan usaha yang mengalami akselerasi tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Grafik I.2
Pertumbuhan PDRB Triwulan (q to q) 2016-2018 (%)

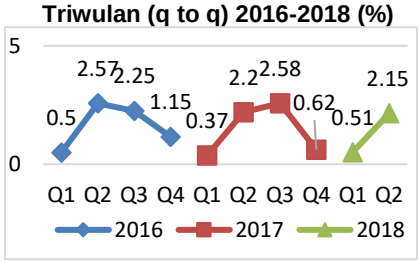

Sumber: Website BPS Provinsi DKI Jakarta 2016-2018

yang tumbuh 23,18 persen dibandingkan periode triwulan I-2018 yang terkontraksi minus 1,57 persen. Jika dilihat sisi komponen pengeluaran, percepatan pertumbuhan didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 70,27 persen diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1,87 persen.

B. Inflasi

DKI Jakarta menempati peringkat ke 55 dari 82 kota besar di Indonesia untuk tingkat inflasi bulan Juni 2018. Perkembangan inflasi DKI Jakarta sangat berfluktuatif yang disebabkan faktor musiman yaitu Hari Raya dan Liburan. Inflasi terbesar bulan Juni 2018 terjadi pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan yang menyumbang sebesar 0,24 persen terutama dari sub kelompok transport.

Tabel I.2
Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2018

Indikator	Proyeksi DKI 2018	Proyeksi Nasional 2018
Inflasi	3,50% - 4,00 %	3,5 ± 1%

Sumber : RKPD Pemprov DKI Jakarta 2018

Grafik I.3
Tingkat Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional April 2017 s.d. Juni 2018 (%)

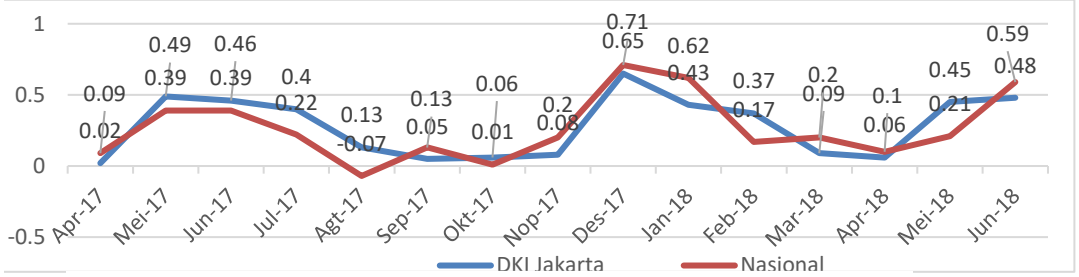

Sumber : Website BPS RI dan Website BPS DKI Jakarta 2017 dan 2018

Hal ini disebabkan naiknya tarif angkutan udara dan angkutan antar kota. Adapun penyumbang inflasi terbesar kedua adalah dari Kelompok Bahan Pangan sebesar 0,13 persen disebabkan kenaikan harga pangan pada saat bulan puasa dan Lebaran terutama kenaikan harga ikan segar dan daging.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Kemiskinan dan Ketimpangan

Tabel I.3
Proyeksi Kemiskinan Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018

Indikator	Proyeksi DKI 2018
Persentase Penduduk Miskin	3,40 – 3,50

Sumber : RKPD Pemprov DKI Jakarta 2018

Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 mencapai 3,57 persen atau mencakup sebanyak 373,12 ribu orang, walaupun mengalami penurunan namun angka ini masih di atas proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD. Secara Nasional DKI Jakarta memiliki persentase penduduk miskin terendah.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir persentase penduduk miskin terendah terjadi pada Maret 2018. Kebijakan Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menurunkan angka kemiskinan salah satunya yaitu Agenda The Magic One Percent

Grafik I.4
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta

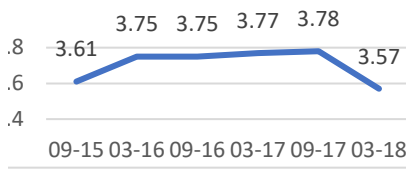

Sumber : Website BPS DKI Jakarta

Pada bulan Maret 2018, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 23,72 persen (tertinggi). Program KJP Plus dan OK OCE digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, hingga saat ini tercatat lebih dari 40 ribu masyarakat DKI yang mengikuti program ini.

Gini Ratio DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebesar 0,394. Angka ini paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Pada Maret 2018, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,16 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah.

Grafik I.5
Perkembangan *Gini Ratio* di DKI Jakarta

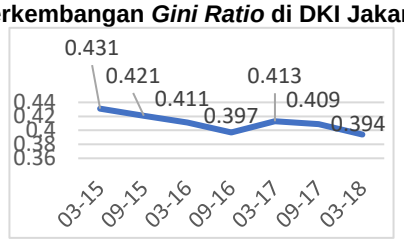

Sumber : Website BPS DKI Jakarta

2. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Februari 2018 sebesar 5,34 persen, turun 0,02 poin jika dibandingkan dengan Februari 2017, dan turun 1,8 poin jika dibandingkan Agustus 2017.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 7,16 persen, diikuti lulusan SMA sebesar 6,95 persen, dan di posisi terendah pada mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,51 persen. Dengan kata lain, mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja sehingga TPT nya relatif rendah.

Dampak Ekonomi Asian Games 2018 untuk DKI Jakarta yaitu selama proses persiapan Asian Games dari tahun 2015-2018 mampu memberikan kesempatan kerja di Jakarta sebanyak 57.300 orang.

Grafik I.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

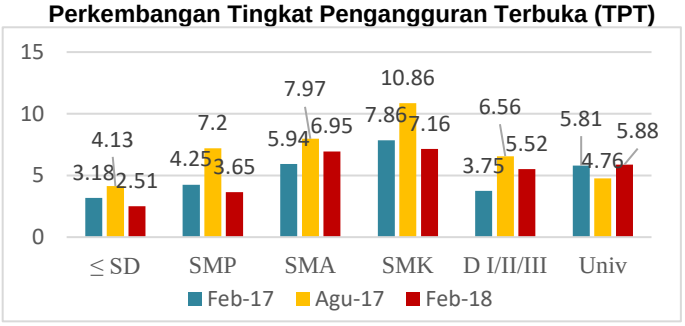

Sumber : Website BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 dan 2018

Pada Februari 2018 penduduk DKI Jakarta yang bekerja di sektor informal meningkat sebesar 0,43 persen dibandingkan Februari 2017. Jika dilihat dari persentase penduduk yang bekerja menurut sektor, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan terbesar (1,46 poin) diikuti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (1,22 poin).

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan APBN secara nasional. Hal ini mengingat sebagian besar dana APBN baik pendapatan maupun belanja negara dikelola oleh Kementerian dan Lembaga yang berlokasi di Jakarta. Postur APBN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. akhir Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	**950.674,6**	**479.222,2**	**1.062.813,4**	**495.941,2**
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	950.674,6	479.222,2	1.062.813,4	495.941,2
1. Penerimaan Pajak	856.703,7	353.095,2	932.577,5	405.230,2
2. PNBP	93.970,9	126.127,0	130.235,9	90.711,0
II. HIBAH				-
B. BELANJA NEGARA	**732.228,5**	**244.479,7**	**778.862,2**	**327.157,2**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**696.677,1**	**238.258,9**	**757.460,4**	**318.415,4**
1. Belanja Pegawai	191.242,2	96.136,1	194.746,5	122.063,4
2. Belanja Barang	171.600,6	54.313,5	194.849,6	59.811,0
3. Belanja Modal	115.773,6	21.138	111.560,7	16.934,4
4. Belanja Subsidi	160.019,5	58.741,1	173.508,8	73.941,6
5. Belanja Hibah	-	-	-	-
6. Belanja Bantuan Sosial	53.001,1	25.439,9	77.496,3	44.932,8
7. Belanja Lain-lain	5.040,1	3.607,2	5.298,5	732,2
8. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	**35.551,4**	**6.220,8**	**21.401,8**	**8.741,8**
1. Transfer ke Daerah	35.551,4	6.220,8	21.401,8	8.741,8
a. Dana Perimbangan	35.551,4	6.220,8	21.401,8	8.741,8
1) Dana Alokasi Umum	-		-	-
2) Dana Bagi Hasil	32.402,5	5.460,9	18.265,2	7.305,7
3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.148,9	759,9	3.136,6	1.436,1
b. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
c. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
d. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
2. Dana Desa	-	-	-	-
C. SURPLUS DEFISIT	**218.446,1**	**234.742,5**	**283.951,2**	**168.784,1**

Sumber: GFS Triwulan II 2018, OM SPAN, Simtrada (data diolah).

Realisasi penerimaan Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan II tahun 2018 mencapai 46,66 persen dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan II 2017 sebesar 50,41 persen. Adapun realisasi belanja Pemerintah Pusat pada triwulan II tahun 2018 mencapai 42,00 persen dari pagu, lebih tinggi dibanding realisasi belanja pada triwulan II tahun 2017 sebesar 33,39 persen dari pagu. Sedangkan realisasi transfer ke

daerah mencapai 40,85 persen dari pagu, meningkat dibandingkan realisasi triwulan II 2017 sebesar 17,50 persen dari pagu.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Grafik II.1
Realisasi Penerimaan PPh Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

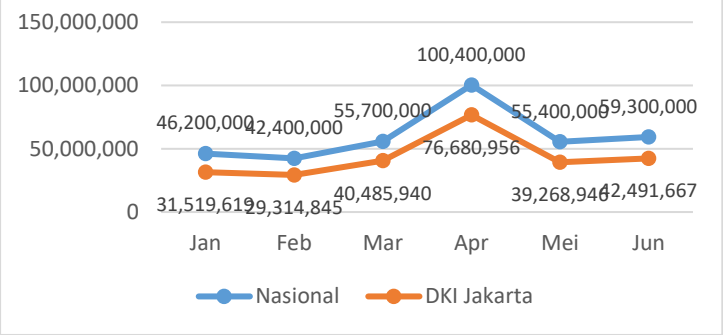

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pada triwulan II Tahun 2018 tercatat sebesar Rp 158.441,57 miliar mengalami kenaikan sebesar 21,21 persen dibandingkan realisasi penerimaan pada triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp 130.711,39 miliar. Adapun secara keseluruhan, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 259,76 triliun menyumbang 72,27 persen dari penerimaan Pajak Penghasilan secara nasional sebesar Rp 359,40 triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian PPh semester I tahun 2018 terutama dari meningkatnya harga minyak dunia, perbaikan basis data wajib pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai dampak program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016-2017

Pertumbuhan penerimaan PPh terutama disebabkan perbaikan data basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai *follow up tax amnesty* . PPh menyumbang 71.73% PPh Nasional

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah

Grafik II.2
Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBm Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

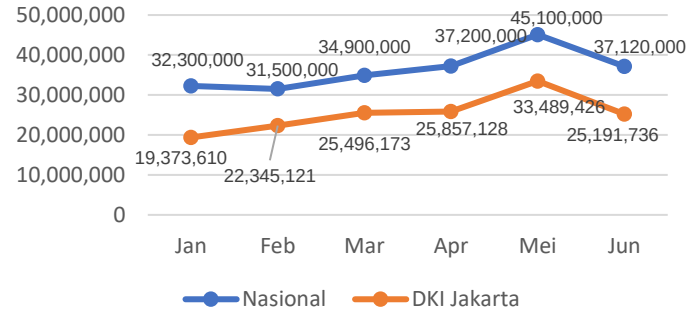

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

Realisasi penerimaan PPN dan PPnBm pada triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp 84,54 triliun dengan kontribusi terbesar dari PPN Impor sebesar 58,51 persen. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi domestik diantaranya kegiatan hari besar keagamaan Idul Fitri. Adapun impor barang dipengaruhi oleh

Peningkatan konsumsi domestik dan impor barang selama awal tahun 2018 memiliki pengaruh yang besar terhadap capaian realisasi pendapatan PPN semester I tahun 2018.

dilaksanakannya proyek infrastruktur dan sektor manufaktur yang cukup besar. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan PPN dan PPnBm pada semester I Tahun 2018 setara dengan 62,78 persen dari realisasi penerimaan PPN dan PPnBm secara nasional sebesar Rp.218,12 trilyun.

c) Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai pada triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp 59,06 miliar. Kinerja tersebut antara lain dipengaruhi kebijakan pemberantasan cukai ilegal serta peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) melalui PMK-146/PMK.010/ 2017 di tahun 2018. Kebijakan peningkatan tarif cukai tersebut dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok, optimalisasi penerimaan cukai serta peredaran rokok ilegal. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan Cukai sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 72,27 miliar setara dengan 0,14% dari penerimaan cukai secara nasional sebesar Rp 50,96 triliun.

Grafik II.3
Realisasi Penerimaan Cukai Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

a) Penerimaan Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan sumber daya alam pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 8,23 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari iuran produksi batubara. Total penerimaan SDA sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 16,16 triliun atau 21,51 persen.

Grafik II.4
Realisasi PNBP Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

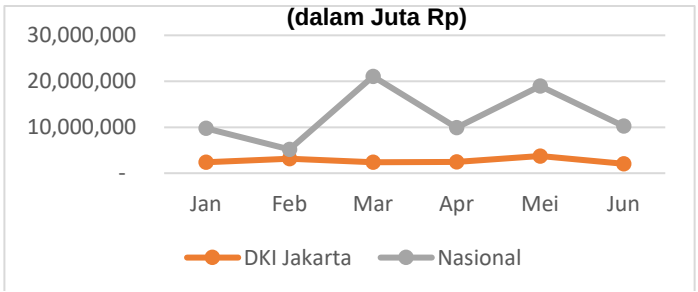

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan sumber daya alam adalah membaiknya harga komoditas khususnya minyak bumi dan tren meningkatnya harga batu bara sepanjang awal tahun 2018.

b) Penerimaan Bagian Laba BUMN

Grafik II.5
Realisasi Penerimaan Bagian Laba BUMN Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018
(dalam Juta Rp)

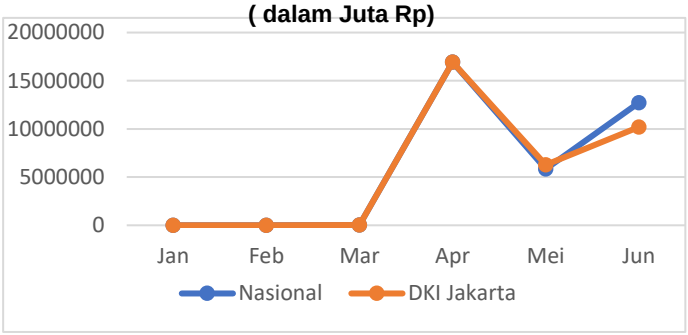

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

Realisasi penerimaan Bagian Laba BUMN pada triwulan II tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,93 triliun atau 6,16 % dibandingkan dengan penerimaan pada triwulan I tahun 2017. Penerimaan ini berasal dari pembagian deviden hak Pemerintah pada BUMN. Total realisasi penerimaan laba BUMN sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp33,38 triliun atau 94,00 persen dari penerimaan nasional sebesar Rp 35,52 triliun.

Peningkatan realisasi pendapatan tersebut disebabkan adanya BUMN yang telah melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan menyetorkan dividen tahun buku 2017 bagian Pemerintah, serta pembayaran piutang dividen tahun buku sebelum 2017 oleh beberapa BUMN.

c) Penerimaan pendapatan BLU

Grafik II.6
Realisasi Penerimaan Pendapatan BLU Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018
(dalam Juta Rp)

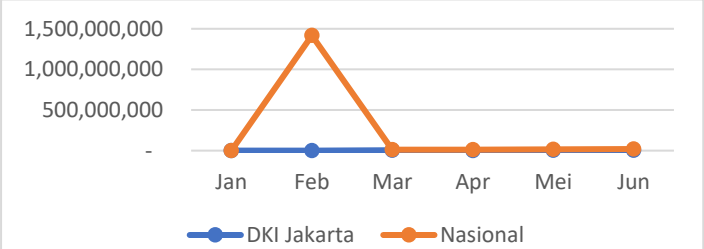

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah)

Penerimaan pendapatan BLU pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 6,25 triliun. Pendapatan tersebut terbesar berasal dari jasa layanan rumah sakit dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.Total realisasi penerimaan BLU sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 11,56 triliun memberikan kontribusi sebesar 55,79 persen dari penerimaan BLU secara nasional sebesar Rp.20,72 triliun.

d) Penerimaan PNBP Lainnya

Grafik II.7
Realisasi PNBP Lainnya Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018
(dalam Juta Rp)

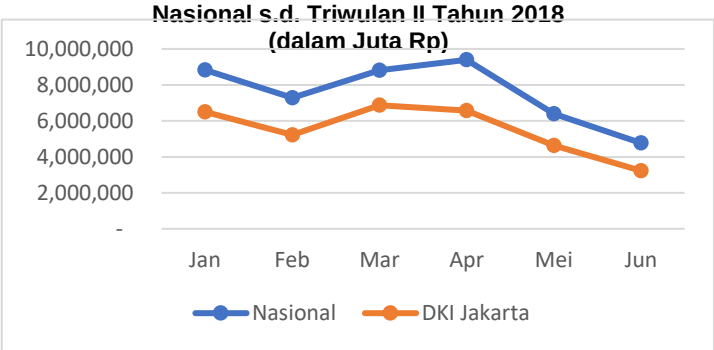

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah).

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 14,44. Pertumbuhan realisasi tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran biaya hak penggunaan izin stasiun

radio serta adanya peningkatan volume layanan atas jasa pada Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi penerimaan PNBP Lainnya pada triwulan II tahun 2018 setara dengan 65,13 persen dari penerimaan PNBP Lainnya secara nasional sebesar Rp.45,48 triliun.

UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Baru Disepakati

UU yang baru ini menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun. "Penyempurnaan tata kelola PNBP yang dituangkan dalam UU PNBP baru ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan Pemerintah yang bersih, professional,transparan, dan akuntabel, serta mendukung tata keloll pemerintahan yang baik secara keseluruhan.", ujar Sri Mulyani.

Sumber: Sindo, Kamis, 26 Juli 2018

3. Pendapatan Hibah

   Sampai dengan triwulan II Tahun 2018 tidak terdapat penerimaan hibah pada lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik II.8
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018

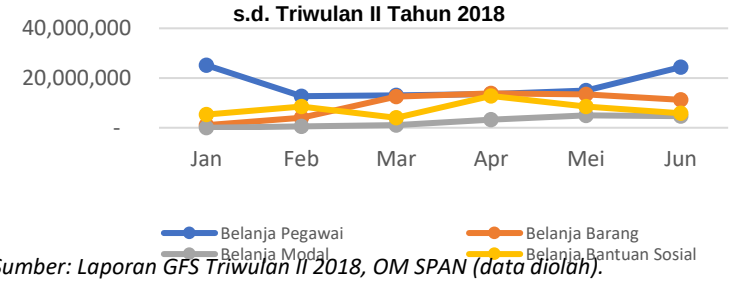

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah).

Total realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 318.415,3 miliar, atau mencapai angka 42,04 persen dari pagu belanja Pemerintah Pusat tahun 2018. Tingginya realisasi belanja pegawai terutama diperuntukkan bagi pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-PNS serta pembayaran THR bagi pensiunan. Adapun rendahnya belanja modal disebabkan karena K/L masih menunggu pemberlakuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara penuh per 1 Juli 2018. Total realisasi belanja Pemerintah Pusat pada Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II tahun 2018 setara dengan 72,72 persen dari total realisasi belanja secara nasional sebesar 437,83 triliun.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Grafik II.10
Realisasi Dana Transfer ke Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Nasional s.d. Triwulan II Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

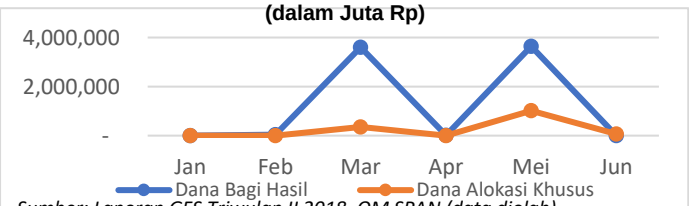

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OM SPAN (data diolah).

Realisasi dana transfer ke daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018 mencapai Rp 8.741,6 miliar atau 40,85 persen dari alokasi

pagu transfer ke daerah sebesar Rp.21.401,8. Apabila dibandingkan dengan alokasi pagu transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 sebesar Rp.766,2 triliun, alokasi transfer ke daerah tersebut relatif kecil, yaitu hanya sebesar 2,79 persen. Hal ini mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi sehingga dapat mengandalkan Penerimaan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan Pemerintah Daerah.

3. Pengelolaan BLU

Grafik II.9
Realisasi Belanja Satuan Kerja Pengguna BLU Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II Tahun 2018
(dalam miliar Rp)

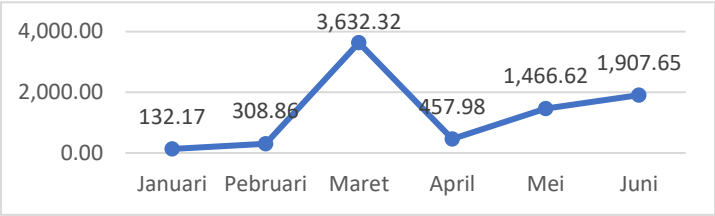

Sumber: Laporan GFS Triwulan II 2018, OMSPAN (data diolah)

Dari jumlah satuan kerja pengelola BLU lingkup Provinsi DKI Jakarta sebanyak 43 satuan kerja, tercatat realisasi belanja BLU sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar Rp 7.905,60 miliar atau 31,14 persen dari pagu sebesar Rp 25.385,87 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 57 persen dari realisasi belanja BLU secara nasional sebesar Rp 13,81 triliun.

4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan triwulan II Tahun 2018, investasi pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 pinjaman terdiri dari 3 pinjaman untuk Pemprov DKI Jakarta dan 1 pinjaman untuk PDAM DKI Jakarta, dan 1 pinjaman untuk KPI. Posisi pinjaman dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel II.2
Outstanding Pinjaman Pemda/PDAM Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II Tahun 2018

No.	Nomor Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Loan Id	Jumlah Hak Tagih (miliar)	Debitur	Status
1.	SLA-876/DP3/ 1996	14-02-1996	2117201	0	Pemprov DKI	Sudah Lunas
2.	AMA-363/SLA-607/DSMI	19-02-2010	2077401	0	PDAM DKI	Sudah Lunas
3.	SLA-1247/DSMI/2012	16-05-2012	2219001	471,32	Pemprov DKI	Belum jatuh tempo
4.	SLA-1263/DSMI/2016	04-02-2016	2241001	9,6 (JPY)	Pemprov DKI	Belum jatuh tempo
5.	RDI-259/DP3/1993	30-01-1993	2001601	24,60	KPI	Belum jatuh tempo (pailit)

Sumber : BAR Outstanding Pinjaman Semester II 2018

Investasi pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN. Hingga saat ini terdapat BUMN yang mendapatkan penerusan pinjaman dari

pemerintah dengan nilai plafon pinjaman dan hak tagih pemerintah hingga triwulan II sesuai tabel II.2.a.

Investasi Pemerintah lainnya adalah pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat. Sampai dengan triwulan II tahun 2018, jumlah dana yang telah disalurkan mencapai sebesar Rp.1,490 triliun, jumlah outstanding pinjaman Rp.1,159 trilyun dan jumlah debitur sebanyak 46.840 orang.

Tabel II.2.a
Outstanding Pinjaman BUMN Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan II Tahun 2018

No	Kurs	Plafon	Hak Tagih Pemerintah
1	JPY	422,900,084,824.03	568,353,965,684.66
2	USD	3,813,175,277.20	1,886,481,367.39
3	IDR	14,338,170,224,068.70	5,212,207,659,274.63
4	EUR	75,369,187.53	12,571,395.60
5	AUD	25965824.02	5,770,183.00
6	DEM	42,263,664.45	5,290,243.30
7	GBP	18,218,093.00	4,554,523.00

(sumber data : KPPN Investasi, Agustus 2018)

C. Prognosis Realisasi APBN

Berdasarkan realisasi pendapatan APBN dalam triwulan I dan II tahun 2018, realisasi pendapatan pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 1.070 triliun. Berdasarkan faktor – faktor di atas, serta tren realisasi belanja pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi belanja pada semester II tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp 910 triliun.

Tabel II.3
Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI JAKARTA s.d. Triwulan IV Tahun 2018

(dalam Miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2018		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi thd Pagu
Pendapatan Negara	1.064.010,20	517.238,21	69,79	1.070.408,47	100,60
Belanja Negara	999.526,99	418.611,34	59,80	910.191,88	91,06
Surplus/Defisit	64.483,21	98.626,87		160.216,59	

Sumber OMSPAN, http://e-rekon-lk.djbn.kemenkeu.go.id/, www.bi.go.id

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Disamping sebagai alat pendorong APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri. APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 mempunyai pagu pendapatan sebesar Rp66.029,98 miliar meningkat 5,62 persen dari tahun sebelumnya dan pagu belanja sebesar Rp71.169,65 miliar meningkat 15,12 persen dari tahun sebelumnya.

APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 menganggarkan penerimaan sebesar Rp66.029,98 miliar dan belanja Rp71.169,65 miliar, hingga triwulan II realisasi masing-masing mencapai 36,6% dan 28,41%

Tabel III.1
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan II Tahun 2017 dan Tahun 2018

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN				
PAD	**41.687,38**	**15.650,07**	**44.570,51**	**15.417,34**
Pajak Daerah	35.359,50	13.170,26	38.125.00	13.336,78
Retribusi Daerah	680,15	260,84	689,90	275,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	465,89	295,77	539,93	0,22
Lain-Lain PAD yang Sah	5.181,84	1.923,20	5.215,68	1.804,94
Pendapatan Transfer	**18.696,34**	**10.832,57**	**21.401,86**	**8.741,62**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	15.537,06	9.353,54	18.265,23	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
Dana Alokasi Khusus	3.159,28	16,58	3.136,63	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus	-	1.462,45	-	-
Dana Penyesuaian	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	**2.134,02**	**4,85**	**57,61**	**6,13**
Pendapatan Hibah	2.134.02	4,85	57,61	6,13
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
Pendapatan Lainnya	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN	**62.517,74**	**26.487,49**	**66.029,98**	**24.165,08**
BELANJA	**61.821,92**	**16.332,99**	**71.169,65**	**20.220,14**
Belanja Pegawai	22.606,12	8.230,21	23.272,19	10.033,99
Belanja Barang	16.737,24	4.567,47	20.035,71	5.613,52
Belanja Bunga	35,56	13,78	50,52	19,87
Belanja Subsidi	1.921,33	28,80	4.210,50	287,94
Belanja Hibah	1.472,76	400,15	1.802,08	915,80
Belanja Bantuan Sosial	3.233,85	1.594,00	4.183,31	1.923,06
Belanja Bantuan Keuangan	364,72	0.65	271,78	-

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Modal	15.410,23	1.483,58	16.995,20	1.425,14
Belanja Tidak Terduga	40,11	15,00	348,36	0,82
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan				
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**61.821,92**	**16.332,99**	**71.169,65**	**20.220,14**
SURPLUS/DEFISIT		**10.154,50**		**3.944,94**

Sumber: Laporan GFS Triwulan II Tahun 2018 dan BPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

Sampai dengan triwulan II 2018 realisasi pendapatan APBD DKI Jakarta sebesar Rp24.165,08 miliar atau mencapai 36,6 persen dari pagu, lebih rendah dari realisasi triwulan II 2017 sebesar 42 persen. Untuk dana transfer sampai dengan triwulan II 2018 realisasi mencapai 40,85 persen dari pagu sebesar Rp21.401,86 miliar, disusul realisasi pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai 10,63 persen dari anggaran sebesar Rp57,61 miliar.Penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagian besar ditopang dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 33,97 persen.

Realisasi APBD yang masih rendah dikarenakan masih dalam proses lelang, penolakan warga terhadap perbaikan dan pembangunan, sulitnya pembebasan lahan, serta masalah politis lainnya. Sumber: Media Indonesia tgl 7/8/2018

Dari sisi belanja, realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai 28,41 persen dari pagu sebesar Rp71.169,64 miliar. Realisasi belanja terbesar berasal dari Belanja Pegawai yang menyumbang 49,62 persen dari total belanja. Tingginya realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan II 2018 disebabkan adanya pembayaran THR pada bulan Juni 2018.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penerimaan PAD didominasi dari penerimaan retribusi daerah sebesar Rp275,40 miliar atau mencapai 39,92 persen disusul penerimaan pajak daerah sebesar Rp13.336,79 miliar atau mencapai 34,98 persen. Hal ini tidak diherankan mengingat Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan. Penyumbang terbesar penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pemakaian Kekayaan Daerah. Penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan untuk penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 0,04 persen pagu.

PAD Provinsi DKI Jakarta didominasi dari penerimaan retribusi sebesar 39.92% disusul pajak daerah sebesar 34,98%, penerimaan retribusi terbesar berasal dari Izin Mendirikan Bangunan dan Pemakaian Kekayaan Daerah

Grafik III.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta
Triwulan II Tahun 2017 dan 2018
(dalam juta Rp)

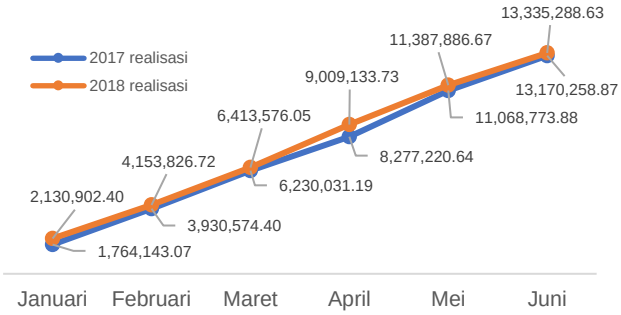

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

Grafik III.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
Triwulan II Tahun 2017 dan 2018
(dalam juta Rp)

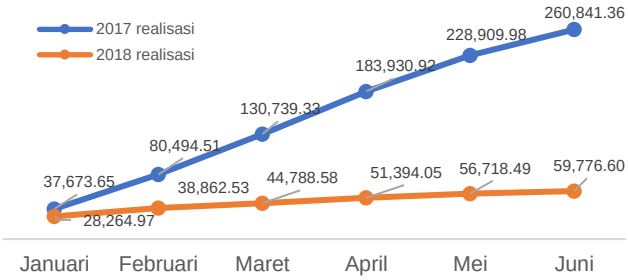

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

a) Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI Jakarta. Pada APBD tahun 2018 pajak daerah pagu yang dianggarkan mencapai 57,74 persen dari pendapatan daerah atau sebesar Rp38.125,00 miliar. Hingga triwulan II 2018 pajak daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai 34,98 persen dari pagu anggarannya. Penyumbang terbesar dari realisasi pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 33,39 persen disusul BBNKB mencapai 21,69 persen dari total realisasi pajak daerah.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Pada APBD tahun 2018, retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp689,90 miliar dan hingga akhir triwulan II 2018 terealisasi sebesar 39,92 persen. Beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, peningkatan *Low Enforcement*, dan Intensifikasi penerimaan retribusi daerah.

Grafik III.3
Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Triwulan II Tahun 2017 dan 2018
(dalam juta Rp)

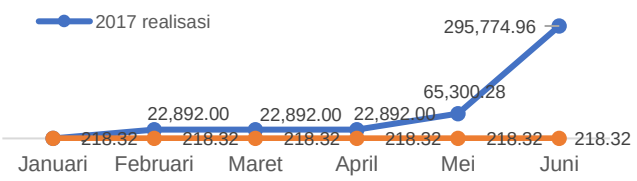

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

Grafik III.4
Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yg Sah Daerah Provinsi DKI Jakarta
Triwulan II Tahun 2017 dan 2018
(dalam juta Rp)

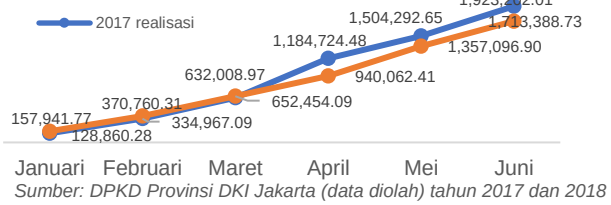

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) tahun 2017 dan 2018

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan dari

Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, deviden daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2018, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp539,93 miliar dan hingga akhir triwulan II 2018 realisasi mencapai 0,04 persen.

Sejak Januari sampai dengan 24 Mei 2018, realisasi penerimaan PKB di Jakarta Barat sebesar Rp756 miliar. Kepala Unit Pelayanan PKB BBNKB Jakarta Barat menyampaikan bahwa realisasi tersebut sudah mencapai 40,73% dari target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2018 (Rp1,85 Triliun). Ia menambahkan realisasi penerimaan pajak BBNKB hingga 24 Mei 2018 sebesar Rp487 miliar (40,52% dari target Rp1,204 triliun).
(*Sumber: website www.beritajakarta.id , Sabtu 26 Mei 2018 00:30 WIB)*

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Pada APBD tahun 2018 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp5.215,68 miliar dan hingga akhir triwulan II 2018 realisasi mencapai 34,61 persen dari pagu.

Grafik III.5
Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2018
(dalam juta Rp)

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) 2018

Grafik III.6
Realisasi Lain-lain Pend. Daerah yang Sah Daerah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2018
(dalam juta Rp)

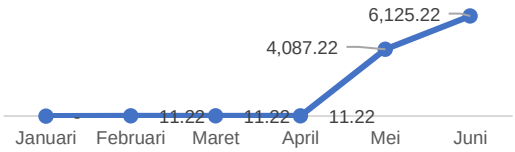

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) 2018

2. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan

Pada APBD tahun 2018, dana transfer dialokasikan sebesar Rp21.401,86 miliar dan hingga akhir triwulan II realisasi mencapai 40,85 persen. Pendapatan untuk dana transfer tersebut 85 persen berasal dari dana bagi hasil pajak sedangkan dana alokasi khusus hanya sebesar 15 persen atau sebesar Rp3,1T. Pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Pajak dan KPP Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan/transfer melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (SDA). (*sumber:: RKU perubahan APBD tahun anggaran 2018*)

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program digital berupa aplikasi Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP) dengan menggandeng Bank DKI. Diyakini bahwa program ini dapat mencegah penyelewengan dana BOS dan BOP serta mencegah kebocoran anggaran. Nantinya program akan memantau BOS dan BOP secara *online* dan *realtime*.
(*Sumber: news.okezone.com, Rabu 02 Mei 2018 17:29 WIB)*

persen. Terjadi penurunan pendapatan hibah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 97,3 persen dikarenakan pada tahun 2017 terdapat hibah MRT dengan nilai yang cukup besar.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

   Realisasi belanja pemda sampai dengan triwulan II 2018 sebesar Rp20.220,14 miliar atau mencapai 28,41 persen dari total pagu. Penyumbang terbesar dari total realisasi belanja berasal dari belanja pegawai disusul oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Grafik III.7
Realisasi Belanja Pegawai, Barang, dan Modal
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Triwulan II Tahun 2018

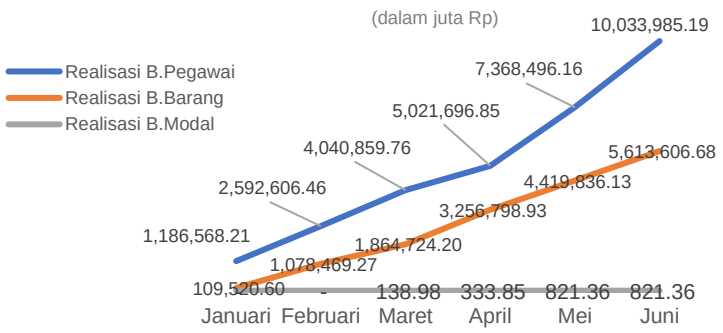

Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta (data diolah) 2018

Belanja pegawai hingga akhir triwulan II 2018 realisasi mencapai 43,12 persen dari dana yang dianggarkan. Belanja barang dan jasa hingga akhir triwulan II 2018 sudah terealisasi mencapai 28,02 persen. Sementara itu belanja modal hingga akhir triwulan II 2018 terealisasi sebesar 8,39 persen, hal ini dikarenakan kendala pada proses lelang, serta proses pembangunan gedung baru yang harus menghapuskan gedung lama dan di-*reappraisal* oleh DJKN, yang membutuhkan waktu cukup lama.

Realisasi belanja Pemda hingga triwulan II sebesar 43,2% meliputi belanja pegawai 43,12%, belanja barang 28,02% dan belanja modal 8,39%

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik III.8
Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Tujuh Urusan Tertinggi)
Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. triwulan II Tahun 2018

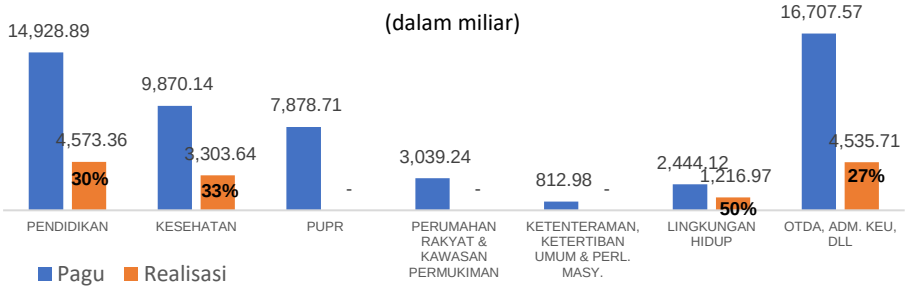

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan sebanyak 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang dituangkan dalam APBD. Urusan wajib yang menjadi prioritas di Provinsi DKI Jakarta mencakup urusan Pelayanan Pemerintah,

Sebanyak 26 urusan wajib & 7 urusan pilihan yang dijalankan Pemda, 7 diantara urusan wajib merupakan prioritas dengan alokasi terbesar mencapai 78,24% dari total belanja.

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, serta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk ketujuh urusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp55.681,65 miliar pada tahun 2018 (78,24 persen dari total belanja). Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang digunakan untuk program-program fisik antara lain penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana umum (sekolah, perumahan, air bersih, ruang terbuka hijau, dsb) guna pencapaian MDG's (*Millennium Development Goals*).

Sedangkan untuk urusan pilihan dengan alokasi terbesar adalah urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pagu dari APBD tahun 2018 sebesar Rp1.162 miliar dan urusan Kehutanan dengan pagu Rp2.717,26 miliar.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Tabel III.2
Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan IV tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. TW II		Perkiraan s.d. TW IV	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Realisasi thd Pagu
Pendapatan Daerah	66.029,98	24.165,08	36,60	64.529,45	97,73
Belanja Daerah	71.169,64	20.220,14	28,41	58.637,26	82,39
Surplus/Defisit		17.094,11		5.892,19	

Sumber : Laporan GFS Triwulan II Tahun 2018 dan BPKD Pemprov DKI Jakarta (data diolah)

Sampai dengan TW III dan IV tahun 2018, diperkirakan perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat dan membaik. Berdasarkan faktor-faktor dan tren realisasi beberapa tahun sebelumnya, diperkirakan realisasi Semester II 2018 sebesar Rp64.529,45 miliar dan diperkirakan realisasi belanja pada triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp58.637,26 miliar.

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Pada Triwulan II tahun 2018 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Provinsi DKI Jakarta akan kembali menjadi satu-satunya provinsi yang tak mendapat kucuran dana alokasi umum (DAU) dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2018, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mampu mencukupi

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Triwulan II tahun 2018					Triwulan II tahun 2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Jumlah Konsolidasian	Kenaikan/ Penurunan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	**495.941,1**	**24.165.1**	**8.741,6**	**511.364,5**	**3,1 %**	**495.851,9**
Pendapatan Perpajakan	405.230,2	13.336,8	-	409.748,7	14,2 %	366.232,5
Pendapatan Bukan Pajak	90.710,9	2.080,6	-	92.797,5	-27,82 %	128.572,6
Hibah	0	6,13	-	6.13	-99,4 %	1.046,8
Transfer	0	**8.741,6***	8.741,6	0	0	0
Belanja Negara	**327.156,9**	**20.220,1**	**8.741,6**	**338.635,4**	**11,3 %**	**381.772,0**
Belanja Pemerintah	318.415,3	20.220,1	-	338.635,5	11,3 %	381.772,0
Transfer	**8.741,6***	0	8.741,6	0	0	0
Surplus/(Defisit)	**168.784,1**	**3.944,9**	**-**	**172.729,0**	**-51,4 %**	**114.079,9**
Pembiayaan	**0**	**13.149,2**	**-**	**13.149,2**	**131,2%**	**5.686.,3**
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	14.119,2	-	14.119,2	86,2%	7.706,3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	970	-	970	51,9%	2.020.0
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	**168.784,1**	**17.094,1**	**-**	**185.878,2**	**-5,4%**	**119.766,2**

Sumber : LKPK Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2018 dan Triwulan II 2017

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.511,36 Triliun dan Realisasi Belanja Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp.338,63 Triliun

*Seluruh pengeluaran Dana Transfer ke Daerah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pemerintah pusat yang dieliminasi dengan penerimaan transfer pemerintah daerah.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan pemerintah pusat di Provinsi DKI Jakarta memiliki pagu dan realisasi yang sangat besar dibandingkan dengan regional lain di Pulau Jawa dan nasional. Untuk penerimaan perpajakan, pagu pajak pusat untuk seluruh Kanwil DJP di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi 76 persen dari pagu seluruh

Kanwil DJP di Pulau Jawa dan 65 persen dari pagu nasional. Sedangkan realisasi pendapatan pajak pusat di DKI Jakarta mencapai 77 persen dari pagu Kanwil DJP di Pulau Jawa dan 68 persen dari pagu APBN nasional.

Grafik IV.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II tahun 2018 dan Triwulan II tahun 2017 (dalam miliar)

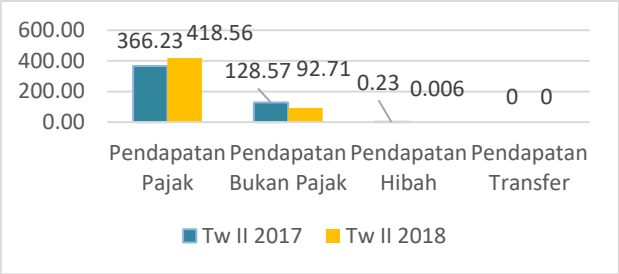

Sumber: LKPK Provinsi DKI Jakarta Triwulan II 2018 dan Triwulan II 2017 (data diolah)

Pada Triwulan II tahun 2018 Terdapat kenaikan jumlah pendapatan pajak konsolidasian antara Triwulan II tahun 2017 ke Triwulan II tahun 2018 sebesar 14,2 persen. Kenaikan ini ditopang jenis penerimaan pajak pemerintah pusat seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN dalam negeri, disebabkan karena adanya kenaikan basis data akibat program *tax amnesty*,serta program kelanjutan dari *tax amnesty.*

Pendapatan Hibah Konsolidasian turun sebesar 97,3% dibandingkan tahun sebelumnya karena pada tahun 2017 terdapat hibah yang sangat besar dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Rp.1.941,45 Milyar kepada Pemprov DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta akan kembali menjadi satu-satunya provinsi yang tak mendapat kucuran dana alokasi umum (DAU) dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2018, hal itu disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mampu mencukupi kebutuhan provinsi. DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam yang sangat besar. DBH pajak misalnya, sampai triwulan II Tahun 2018 tercatat mencapai lebih dari Rp8 triliun.

Grafik IV.2
Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II tahun 2018 (dalam triliun Rupiah)

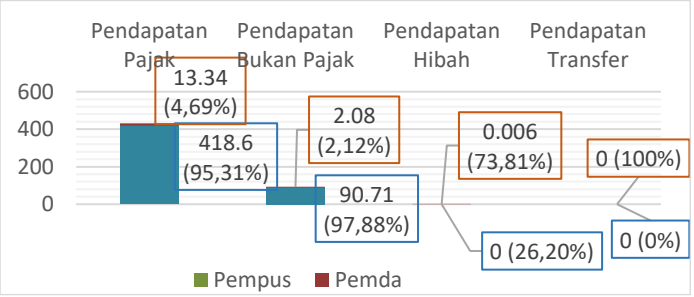

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018 (data diolah)

Sementara jumlah Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian turun sebesar 27,82 persen. Penurunan PNBP di DKI Jakarta berasal dari pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.280,61 milyar atau 9,97 persen dibanding realisasi pendapatan BLU pada Triwulan II tahun 2017, namun hal ini tidak mempengaruhi peningkatan PNBP nasional sebesar 21,01 persen yang

disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas global. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah Konsolidasian turun sebesar 99,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2017 terdapat hibah yang sangat besar dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT Rp.1.941,45 Milyar kepada Pemprov DKI Jakarta. Penerimaan pemerintah pusat dalam pendapatan pajak konsolidasian, jauh lebih besar daripada pendapatan pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi DBH pada tahun 2018 sebesar Rp.18.265 milyar atau 46 persen dari total alokasi DBH seluruh Provinsi dari APBN yang sebesar Rp.39.625 milyar.

Grafik IV.3
Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II tahun 2018 (Triliun Rupiah)

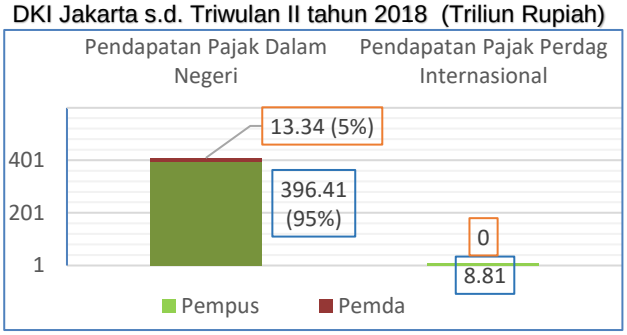

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018 (diolah)

2. Analisis Perubahan

Pendapatan pajak dalam negeri pemerintah pusat 95 persen dari pendapatan pajak konsolidasian, jauh lebih besar daripada penerimaan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 5 persen. Sedangkan untuk pendapatan pajak perdagangan internasional , tidak ada di pendapatan pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Grafik IV.3 di atas.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Pada Triwulan II tahun 2018 PDRB Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp654,28 Triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen.

Tabel IV.2
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi DKI Jakarta Triwulan II tahun 2017 dan 2018 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Triwulan II tahun 2017		Triwulan II tahun 2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	366,23	8,25 %	418.56	14,28 %
PNBP	128.57	34,47 %	92.79	-27,82 %
Total	494.80	14,03 %	511.35	3,34 %
PDRB/Pert. Ekonomi	590,91	10,48 %	654,28	10,72 %

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 (diolah) dan Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 (diolah)

Pada periode yang sama, selisih pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan PDRB terealisasi sebesar Rp142.93 Triliun. Selisih negatif angka pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut menunjukkan potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi belum dioptimalkan secara baik khususnya oleh pemerintah daerah.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.4
Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2018 (dalam triliun Rupiah)

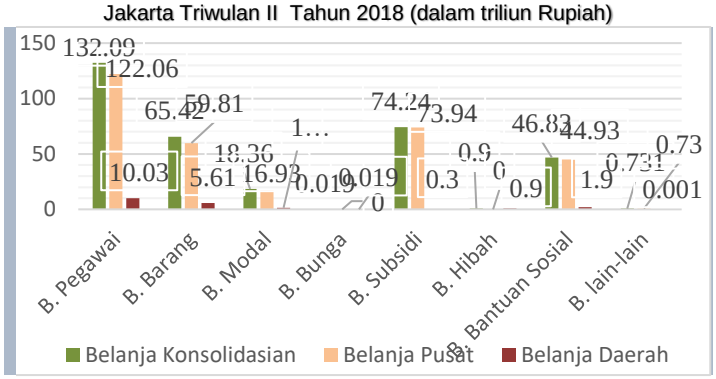

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018 (diolah)

Seluruh Belanja Konsolidasian didominasi oleh Belanja Pusat karena Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana DIPA yang dikelola DKI Jakarta dengan pagu total Rp.923,251 milyar mencapai 63,47 persen dari DIPA nasional yang sebesar Rp.1.454.500 milyar.

DIPA yang dikelola DKI Jakarta dengan pagu total Rp.923,251 milyar mencapai 63,47 persen dari DIPA nasional yang sebesar Rp.1.454.500 milyar.

2. Analisis Perubahan

Total Belanja Pemerintah konsolidasian naik sebesar 11,65 persen. Hampir semua komponen Belanja mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan II Tahun 2017 kecuali Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar 18.06 persen disebabkan masih dalam proses penyelesaian pekerjaan. Yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah belanja subsidi konsolidasian yang naik 26,3 persen. Meningkatnya realisasi subsidi energi

Grafik IV.5
Tabel Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta Triwulan II tahun 2017 dan 2018 (dalam%)

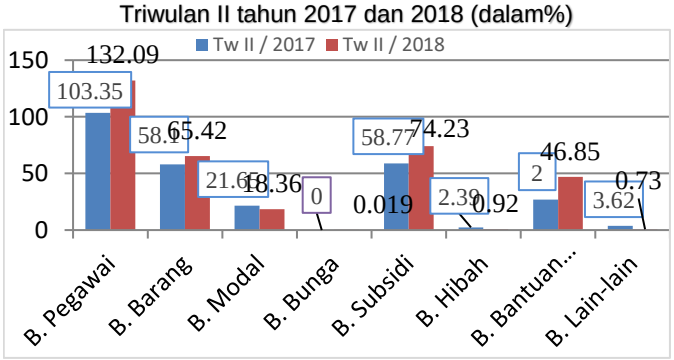

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2017 dan 2018 (diolah)

sebagai dampak menguatnya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK.

Belanja bantuan sosial konsolidasian naik sebesar 70 persen dipengaruhi adanya komitmen pemerintah dalam program-program perlindungan sosial.

Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

a. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II tahun 2018 yang mencapai 5.93 persen (y on y). Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Nasional mencapai 5.27 persen. DKI Jakarta berkontribusi 17,57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

b. Menghadapi tekanan inflasi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2018, perkembangan harga-harga di Ibukota pada Juni 2018 terkendali. Hal ini ditunjukkan oleh inflasi bulan Juni yang hanya sebesar 0,48 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historis inflasi bulan Idul Fitri dalam tiga tahun terakhir, yaitu 0,69 persen (mtm). Terkendalinya inflasi DKI Jakarta juga tercermin dari pencapaian yang lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 0,59 persen (mtm). (https://infopangan.jakarta.go.id/news/id/84)

c. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2018 sebesar 3,57 persen atau sebanyak 373.120 orang. Dibandingkan dengan September 2017 (3,78 persen atau 393.130 orang), persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau menurun sebesar 20.010 orang. Sedangkan dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77 persen atau 389.690 orang), persentase penduduk miskin menurun 0,20 poin atau menurun sebesar 16.570 orang. ("Kemiskinan DKI Terendah Sejak Empat Tahun Terakhir", https://megapolitan.kompas.com/ read/ 2018/07/ 17/10362541/kemiskinan-dki-terendah-sejak-empat-tahun-terakhir. Penulis Nibras Nada Nailufar ; Editor : Dian Maharani.)
Faktor yang menjadi pendorong menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yaitu inflasi umum yang cukup terkendali dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

d. Pertumbuhan ekonomi juga didukung Investasi PMDN dan PMA. Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan TKA. Di samping itu, penyederhanaan perizinan berusaha kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Daya tarik lainnya dalam upaya peningkatan daya saing iklim investasi Indonesia,

Dampak Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meeujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 persen, mengendalikan inflasi dan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 20.010 orang

Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta mencatat Realisasi investasi DKI Jakarta pada semester I 2018 (Januari-Juni) mencapai Rp 49 triliun, terdiri dari PMDN sebesar 18,90 triliun dan PMA sebesar 30,54 triliun. Investasi paling besar berada pada perdagangan yang mencapai 6,9 triliun diikuti sektor perumahan dan kawasan industry sebesar 4,1 triliun.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan *tax holiday*.

Realisasi investasi DKI Jakarta pada semester I 2018 (Januari-Juni) mencapai Rp 49 triliun, terdiri dari PMDN sebesar 18,90 triliun dan PMA sebesar 30,54 triliun. Investasi paling besar berada pada perdagangan yang mencapai 6,9 triliun diikuti sekotr perumahan dan kawasan industry sebesar 4,1 triliun.

e. Dalam hal ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta meningkat menjadi 69,27 dibandingkan tahun 2017 yang 61,97 persen. Sementara tingkat pengangguran turun 1,8 poin dari angka 7,14 di tahun 2017 menjadi 5,34 di tahun 2018. Hal ini menunjukkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai hasil investasi maupun upaya pemerintah pusat dan daerah menciptakan lapangan kerja melalui program Oke Oce maupun Kredit Usaha Rakyat. Dua gelaran akbar yang akan dilaksanakan di Indonesia pada triwulan III, yaitu Asian Games dan Annual Meeting IMF-World Bank, meski menyediakan lapangan kerja yang bersifat sementara, namun akan menyerap SDM yang ada.

   Demikian pula naiknya posisi Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) ke peringkat 72 juga akan mendorong ekspansi dan investasi di dalam negeri yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja.

Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laporan Operasional Triwulan II tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel 4.3 di bawah ini:

Dari Laporan Operasional Triwulan II Tahun 2018 diperoleh Nilai Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB mencapai 29,83 persen, sementara nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB mencapai 2,68 persen

Tabel IV.3
Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi DKI JAKARTA Triwulan II tahun 2018
(dalam milyar Rupiah)

	Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
	Pendapatan:	**838.585.743.114.465**
a.	Pajak	417.797.421.102.322
b.	Kontribusi sosial	0
c.	Hibah	63.731.937.938
d.	Pendapatan lain	420.724.320.074.204
	Beban:	**320.534.653.064.090**
a.	Kompensasi pegawai	133.359.911.474.065
b.	Penggunaan barang dan jasa	56.841.859.315.609
c.	Konsumsi aset tetap	0
d.	Bunga	19.869.637.173
e.	Subsidi	74.229.557.803.068
f.	Hibah	602.354.377.900
g.	Manfaat sosial	46.855.834.230.922
h.	Beban Lainnya	8.625.266.225.353
	Keseimbangan operasi bruto/neto	**518.050.820.050.375**

	Transaksi Aset Non Keuangan Neto	**18.359.497.522.049**
a.	Aset tetap	17.556.997.223.513
b.	Persediaan	0
c.	Barang berharga	0
d.	Aset nonproduksi	802.500.298.536
	Net Lending/Borrowing	**499.691.322.528.326**
	Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	0
a.	Akuisisi Neto Aset Keuangan	**500.627.700.646.254**
-	Domestik	500.627.700.646.254
-	Luar Negeri	0
b.	Keterjadian Kewajiban	
-	Domestik	**500.627.700.646.254**
-	Luar Negeri	500.627.700.646.254

Sumber: Laporan Operasional LSKP- Triwulan II tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta

1. Nilai Kontribusi belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta

   Nilai ini dihasilkan dengan membandingkan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah (kompensasi pegawai+ penggunaan barang dan jasa,konsumsi asset tetap dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang dan jasa) dikurangi penjualan barang dan jasa) terhadap PDRB, dengan hasil sebagai berikut :

   $$\frac{\text{nilai konsumsi pemerintah}}{\text{PDRB}} = \frac{190.201.770.789.674}{654.280.000.000.000} = \mathbf{29{,}83\ \%}$$

   Apabila dilihat dari hasil rumus di atas, Nilai Kontribusi belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta sebesar 29,83 persen tersebut mencerminkan kontribusi Pemerintah berperan cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi ini diharapkan lebih meningkat pada masa yang akan datang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat pula. Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta Triwulan II Tahun 2018 yang dicatat melambat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, kemungkinan karena belum memperhitungkan seluruh realisasi Belanja APBN di wilayah DKI Jakarta secara konsolidasian, serta belum memperhitungkan nilai investasi yang cukup besar seperti pada uraian sebelumnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus meningkatkan investasi serta menggiatkan swasta agar berinvestasi secara aktif, karena investasi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat.

2. Nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB dihitung dari perbandingan nilai PMTB (aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto) dibagi dengan PDRB =

   $$\frac{17.556.997.223.513}{654.280.000.000.000} = \mathbf{2{,}68\ \%}$$

   Bila dilihat dari nilai di atas, kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sangat kecil hanya 2,68 persen. Hal ini disebabkan pada umumnya pemerintah berinvestasi pada Aset Bangunan sedangkan swasta pada aset non bangunan. Diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan investasi

serta menggiatkan swasta agar berinvestasi secara aktif, karena investasi dapat menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat. Nilai investasi diatas merupakan angka dari GFS triwulan II tahun 2018 tanpa memperhitungkan nilai investasi yang dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta sebesar Rp49 Triliun.

Dunia usaha memerlukan Iklim investasi kondusif antara lain kepastian hukum yang menyangkut konsistensi kebijakan, termasuk persoalan tanah, perburuhan, dan perizinan. serta ditopang sumber daya manusia beretos kerja tinggi dan produktif. Oleh karena itu, pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai kebutuhan sektor nil menjadi hal penting. Koordinasi antar-kementerian dan lembaga dibutuhkan agar program pendidikan vokasi yang gencar didorong pemerintah saat ini berjalan dengan baik.

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Dampak Ekonomi Pelaksanaan Asian Games 2018 Capai Rp 45 Triliun

Bappenas memperkirakan dampak langsung pengeluaran peserta dan pengunjung Asian Games 2018 mencapai Rp3,6 triliun.Dengan rincian, pengeluaran sebesar Rp2,5 triliun di Jakarta dengan konsentrasi persebaran peserta dan pengunjung sebanyak 70 persen dan Rp1,1 triliun di Palembang dengan konsentrasi persebaran peserta dan pengunjung sebanyak 30 persen. Sementara pengeluaran terbanyak ada pada biaya akomodasi yang mencapai Rp1,3 triliun dan biaya terbesar kedua adalah transportasi sebesar Rp640 miliar, makanan dan minuman sebesar Rp628 miliar, biaya belanja mencapai Rp560 miliar, dan biaya hiburan sebanyak Rp280 miliar.

Asian Games memberikan dampak ekonomi yang positif terhadap Indonesia, di antaranya, meningkatkan sektor pariwisata, rnenciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas olahraga.

Total perkiraan biaya konstruksi fasilitas pendukung Asian Games 2018, termasuk pembangunan Gelora Bung Karno, Stadion Jakabaring, wisma atlet, dan Light Rapid Transit (LRT) mencapai Rp34 triliun, sedangkan biaya operasional sebesar Rp7,2 triliun. Dengan demikian, total dampak langsung penyeienggaraan Asian Games 2018 mencapai Rp45,1 triliun.

B. Kemiskinan DKI Terendah Sejak Empat Tahun Terakhir

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2017 - September 2017 - Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,57 persen pada periode September 2017 - Maret 2018 (dari Rp 578.247 per kapita per bulan menjadi Rp 593.108 per kapita per bulan), dan naik sebesar 10,54 persen pada periode Maret 2017 - Maret 2018 (dari Rp 536.546 per kapita per bulan menjadi Rp 593.108 per kapita per bulan).

BPS DKI Jakarta merilis tingkat kemiskinan dan ketimpangan di DKI Jakarta periode Maret 2018. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, persentase penduduk miskin terendah terjadi pada Maret 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meyakini faktor yang menjadi pendorong menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yaitu inflasi umum yang cukup terkendali dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. "Pemprov DKI Jakarta, untuk mengurangi tingkat kemiskinan, di antaranya melakukan kegiatan penyediaan pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu untuk komoditas daging sapi, daging ayam, telur, dan beras," kata Sandiaga, Senin (16/7/2018).

DAFTAR PUSTAKA

Cover

http://www.bingkaiberita.com/

http://epic.co.id/hari-ini-12-kereta-mrt-jakarta-dikirim-dari-jepang/

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fsportourism.id%2Ftag%2Fpatung-selamat-datang&psig=AOvVaw1u9s9BSdBAgjGTj7KRCQaX&ust=1534318171652286

Isi

Website Badan Pusat Statistik RI

Website Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Goverment Finance Statistik Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Website BPKD Provinsi DKI Jakarta

Online Monitoring SPAN

Aplikasi e-rekon

Aplikasi SLIM

Aplikasi SIKP

Berita Terpilih

(Penulis dan Editor : Alexander Haryanto, https://tirto.id/dampak-ekonomi-pelaksanaan-asian-games-2018-capai-rp-45-triliun-cJrK)

(https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/17/10362541/kemiskinan-dki-terendah-sejak-empat-tahun-terakhir. Penulis : Nibras Nada Nailufar, Editor : Dian Maharani)

https://news.okezone.com/read/2018/05/02/338/1893698/pemprov-dki-luncurkan-aplikasi-cegah-penyelewengan-dana-bos-bop (Fadel Prayoga, Jurnalis)

http://www.beritajakarta.id/read/58709/realisasi-penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-jakbar-capai-rp-756-miliar#.W3E89DkRXDc (Reporter : Folmer , Editor : Budhy Tristanto)

https://ekbis.sindonews.com/read/1325269/33/21-tahun-berlaku-uu-penerimaan-negara-bukan-pajak-baru-disepakati-1532593764

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/18/13382651/sandiaga-target-kami-turunkan-kemiskinan-1-persen-dalam-5-tahun

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/30/asian-games-2018-membuka-57-ribu-lapangan-kerja-di-jakarta